### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan terjadinya sebuah kudeta di Turki pada tahun 2016 dan menimbulkan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Erdogan terhadap kelompok Gülenisme yang merupakan dalang di balik kudeta Turki tahun 2016, sehingga menarik sebuah rumusan masalah dengan menggunakan metode deskriptif. Sub bab selanjutnya menjelaskan kerangka berpikir sebagai sebuah penguat suatu penelitian diikuti dengan hipotesis yaitu jawaban sementara dari sebuah penelitian. Sub bab berikutnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dan untuk menghindari kesalah-pahaman, di dalam sub bab penegasan judul penulis menjelaskan pengertian pada judul skripsi ini.

## A. Latar Belakang Masalah

Recep Tayyep Erdogan adalah presiden Turki ke-12. Sejak Erdogan memimpin Turki, telah terjadi perubahan aliran politik yang dominan drastis. Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Perjuangan Erdogan beserta partai yang dibawanya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan memberikan perubahan atas keterpurukan Turki selama ini serta menjunjung tinggi perdamaian, antara lain dengan membangun perekonomian dan menegakkan demokrasinya.

Semangat demokratisasi yang ada di Turki, di satu sisi merupakan peluang bagi Turki untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan. Banyak pihak menilai Turki mampu menjadi inspirasi bagi pembangunan demokrasi di Timur Tengah. Tokoh Ennahda dari Tunisia, Rachid Ghannouchi menyatakan bahwa mereka belajar dari Turki memadukan Islam dengan modernitas. Turki dipandang sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam mewujudkan HAM, kebebasan demokrasi dan kemajuan ekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Altunışık (2005), ada tiga elemen penting dalam pengalaman Turki, yakni sekularisme, demokrasi dan pengaruh internasional. Ketiga elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi pembentukan dan pengembangan pengalaman demokratisasi Turki dan identitas negara Turki sebagai salah satu negara demokratis di Timur Tengah. Keterkaitan ketiga elemen tersebut dalam membangun pengalaman Turki bisa dilihat dari dinamika perkembangan politik modern Turki. Awal sejarah Turki ditandai dengan adanya sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sekularisasi ini merupakan upaya Atatürk untuk melakukan modernisasi terhadap kondisi Turki yang dianggap sudah jumud dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman modern pada masa itu. Atatürk kemudian melakukan upaya pemisahan agama dari politik secara ketat (dikenal dengan istilah *laikik*) dengan mengupayakan pembentukan undangundang sekuler dalam pemerintahan Turki yang baru, melarang perkumpulan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012, *Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hlm. 370-371.

agama untuk melakukan kegiatan tanpa seizin pemerintah, serta melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di publik.

Proses sekularisme yang dilakukan oleh Atatürk pada masa itu memang mengundang kontroversi dari masyarakat yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Turki Usmaniyah yang terbiasa dengan hukum Islam. Namun seiring waktu, perlawanan tersebut diredam oleh pemerintah Atatürk yang mencoba untuk melakukan represi terhadap kelompok-kelompok reaksioner serta memberlakukan sistem partai tunggal dalam politik Turki yang menghalangi adanya perdebatan politik mengenai sekularisme.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, sekularisme mulai menghadapi kritik dan tantangan seiring terjadinya proses demokratisasi di Turki pada pertengahan tahun 1950-an. Penerapan sistem multipartai memungkinkan munculnya beberapa partai Islam (meskipun dalam skala yang kecil) dan partai dengan arus ideologi yang berbeda di Turki sehingga memungkinkan adanya pandangan-pandangan alternatif tentang sekularisme. Pandangan alternatif terkait sekularisme Turki yang paling utama dikemukakan oleh Demokratik Parti (DP) yang menjadi partai berkuasa pada tahun 1950, dimana DP mencoba untuk merevisi pandangan sekularisme yang dijalankan dengan ketat oleh pemerintahan sebelumnya menjadi sekularisme yang lebih moderat dan menghormati hak-hak kaum beragama untuk menjalankan agamanya di ruang publik politik. Namun, adanya dominasi pihak Kemalis (pengikut Atatürk) yang terdiri dari politisi dan tentara dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hadza Min Fadhli Robby, 2014, *Peran Turki Sebagai Norm Entreprneur Dalam Upaya Lokalisasi Norma Demokrasi Di Timur Tengah*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hlm. 22.

perpolitikan Turki tidak memungkinkan terjadinya perubahan secara signifikan dalam pandangan terkait sekularisme di Turki yang memberikan ruang kepada para pemeluk beragama untuk menjalankan keyakinannya.<sup>3</sup>

Pada kurun 1960-1970, perpolitikan Turki mulai diramaikan oleh partisipasi dari gerakan-gerakan sosial masyarakat yang digerakkan oleh basis massa Islam konservatif. Gerakan sosial masyarakat tersebut diantaranya adalah gerakan Hizmet yang dimunculkan oleh Muhammad Fethullah Gülen, gerakan Nurcu yang dimunculkan oleh Bediuzzaman Nursi, dan gerakan Milli Görüs yang dimunculkan oleh Necmettin Erbakan. Milli Görüs menjadi sebuah gerakan yang memiliki momentum yang besar dan memiliki intensi untuk terlibat dalam perpolitikan Turki untuk mempromosikan agenda-agenda kalangan Islam konservatif, diantaranya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan kaum miskin di daerah pedalaman Turki. Gerakan Milli Görüs melihat bahwa adanya sekularisme yang diterapkan Turki bukannya menghasilkan kemajuan bagi negara Turki, namun kemunduran, sehingga sistem sekularisme yang telah diterapkan Turki perlu direvisi bahkan diubah karena tidak sesuai dengan semangat masyarakat Turki. Seiring waktu, Milli Görüs berkembang menjadi partai. Dalam beberapa kesempatan, partai yang didirikan oleh basis massa Milli Görüs terus berubah karena adanya tekanan politik dari pihak berkuasa.4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Ditengah-tengah upaya perebutan pengaruh Islam di Turki yang menganut paham Sekuler, muncullah seorang presiden yang memiliki spirit keislaman, yaitu presiden Erdogan. Berkuasanya Erdogan menjadikan Turki sebagai topik hangat dalam perpolitikan internasional. Banyak kebijakan Erdogan mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan luar negeri Erdogan dianggap lebih Islami oleh dunia internasional.<sup>5</sup>

Namun, keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki memberikan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan nasional di internal Turki. Salah satu dampak positifnya adalah kini Turki telah bebas menggunakan simbolsimbol Islam sebagai identitas Turki, dan Erdogan hadir sebagai penakluk sekularimse Turki. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan, sampai mengakibatkan terjadinya kudeta militer Turki pada Juli tahun 2016.

Dilihat dari kejadian kudeta militer pada Juli tahun 2016 kemarin, bahwa terjadinya kudeta dilakukan oleh "struktur paralel" yaitu merujuk kepada sekelompok birokrat yang berafiliasi kepada gerakan Gülen. Erdogan memberikan tuduhan kepada Fethullah Gülen yang terlibat dalam kudeta berdarah di Turki. Dan para pelaku kudeta tersebut merupakan para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia mereka. Para pengikutnya di birokrasi sipil, kejaksaan, kepolisian dan di militer lebih loyal kepada perintah Gülen ketimbang institusi dimana mereka bekerja.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Atika Puspita Marzaman, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Intervensi NATO ke Libya*, Tesis, Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hlm. 1.

Namun perlu diketahui bahwa Erdogan dan Gülen merupakan sahabat seperjuangan yang sama-sama berjuang untuk perbaikan Turki. Erdogan dan Gülen dikenal sebagai sosok intelektual, keduanya berjuang dalam kebangkitan Islam Politik, dan menentang sekularisme. Erdogan juga menganggap bahwa Fethullah Gülen merupakan salah satu guru spiritual yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi dirinya maupun bagi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Dan dulunya, Gülen merupakan salah satu sahabat yang sangat mendukung karier Erdogan, namun untuk beberapa hal persoalan hubungan persahabatan itu bergeser menjadi hubungan yang tidak baik.

Gülen memiliki gerakan yang diibaratkan seperti Ormas Islam dan sekarang popular dengan sebutan Hizmet. Bedanya gerakan ini tidak bergerak dalam bidang sosial. Hizmet adalah organisasi gerakan yang diinspirasi oleh sikap Fethullah Gülen, seorang pengkhutbah Turki yang kini berbasis di Amerika Serikat.<sup>6</sup> Gerakan Gülen ini memiliki jaringan yang sangat luas bahkan tersebar hingga ke luar negeri. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat rahasia sehingga Erdogan sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Turki sulit untuk menjalin kerjasama, maka eksistensi *Nation State* Turki terancam oleh gerakan transnasional Gülenis. Dan lebih terancamnya lagi para pengikut Hizmet ini menempati posisi-posisi penting di Turki.

Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan menetapkan bahwa Hizmet merupakan organisai terlarang dan menggolongkan gerakan ini merupakan gerakan teroris. Dimana tujuan dari Hizmet atau kelompok teror Gülen ingin

<sup>6</sup> Hizmet Organisasi Terlarang di Turki yang Membuat WNI di Penjara, http://news.detik.com, akses pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 14:08.

menjatuhkan pemerintahan. Kini media-media yang berafiliasi dengan Hizmet telah ditutup, sebuah bank disita, dan ratusan orang ditahan. Ribuan ulama pengikut Gülen yang diproses hukum telah kehilangan pekerjaan mereka. Pasca kudeta 15 Juli, Erdogan juga menutup lebih dari 2.000 lembaga yang berhubungan dengan Gülen di seluruh negeri. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan swasta, organisasi, asrama, dan hotel ditutup karena memiliki hubungan dengan Gülen. Terdapat 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Gülen telah ditutup oleh Erdogan.

Menurut penulis, kebijakan pemerintah Turki terhadap organisasiorganisasi terlarang tersebut akan berdampak kepada negara-negara lain.
Contohnya, baru-baru ini salah satu WNI ditangkap polisi setempat gara-gara ikut
dalam organisasi terlarang yang bernama Hizmet. Di samping itu, hubungan Turki
dengan Amerika juga akan mengalami kesurutan disaat Amerika dituduh berperan
dan terlibat dalam kasus kudeta di Turki. Dan tuduhan ini akan membahayakan
hubungan bilateral antara Turki dan Amerika. Terdapat kenangan yang
menyakitkan dibalik kudeta tahun 1960, 1971, dan 1980 dimana Amerika terlibat
dalam kudeta yang sukses itu. Bahkan Amerika praktis terlibat dalam memberi
dukungan tanpa syarat pada kudeta militer paling brutal yang pernah terjadi di
Turki.

 $^{7}$  Ibid.

Sejarah kecurigaan seperti itu, ditambah lambatnya Amerika dalam menanggapi dan mengutuk kudeta yang gagal, tidak seperti Rusia dan Iran, menyebabkan Turki, termasuk menteri-menteri pemerintah, menuduh Amerika terlibat. Padahal Amerika dan Turki merupakan anggota NATO, namun dari pihak Amerika sendiri seperti musuh dalam selimut, yang mana seharusnya sebagai sesama anggota NATO saling berunding dan membantu dalam kasus kudeta ini.

Kini Amerika Serikat tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan Fethullah Gülen. Dan Turki akan terus mengirimkan bukti kepada Amerika, sampai akhirnya Gülen diekstradisi ke Turki. Dan apabila Amerika terus mempertahankan Gülen maka hubungan bilateral antara Amerika dan Turki akan berdampak negatif. Dan kini kegagalan kudeta militer memperkuat praktik Islamisasi Turki yang dijalankan Presiden Recep Tayyep Erdogan. Kini kelompok sekuler Turki kian tersisihkan dan mengkhawatirkan keamanan pribadi. Sarena di antara mereka merupakan kelompok yang pro dengan Gülen.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka dapat di rumuskan suatu permasalahan yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Hubungan Turki-AS Tegang Pasca Kudeta Gagal*, http://www.voaindonesia.com, akses pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 14:58.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kaum Sekuler Turki Terisolasi Pasca Percobaan Kudeta, http://www.dw.com, akses pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 15:02.

"Bagaimana dampak politik dan hubungan internasional dari kebijakan Presiden Erdogan terhadap kelompok Gülenisme pasca kudeta militer tahun 2016?"

# C. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan di atas, teori yang digunakan penulis adalah **Teori Pembuatan Putusan.** Dalam istilah David Easton, putusan adalah "output" luaran sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritatif (dengan penggunaan kekuasaan). <sup>10</sup>

Decision-making adalah "simply the act of choosing among available alternatives about which uncertainty exists" (sekadar tindakan memilih alternative yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian). <sup>11</sup> David Easton telah mendefinisikan politik sebagai "alokasi nilai-nilai secara paksa bagi suatu masyarakat," atau "the authoritative allocation of values for a society". Ini pada hakekatnya adalah intisari dari pembuatan putusan politik. <sup>12</sup>

Sekumpulan unit-unit yang membentuk sistem politik bertujuan membuat keputusan untuk masyarakat. Keputusan-keputusan yang menyangkut tujuan-tujuan negara di lingkungan eksternal, sarana dan sumberdaya yang digunakan untuk mengejar tujuan itu, dan memuat tanggapan sistem politik itu terhadap tuntutan dari lingkungan eksternal adalah keputusan-keputusan politik luar

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff Jr, 2014, *Teori-Teori Hubungan Internasional Sebuah Survai Komprehensif (alih bahasa Bambang Wahyu Nugroho)*, Yogyakarta: LP3M UMY, hlm. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

negeri. <sup>13</sup> Sebagai sistem terbuka sistem politik berhubungan terus-menerus dengan lingkungannya melalui penerimaan input, dalam bentuk tuntutan dan dukungan dari lingkungannya, dan melalui output, yang berupa upaya sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau untuk mengendalikannya. Proses merubah input menjadi output itulah proses pembuatan keputusan. <sup>14</sup>

Suatu keputusan telah dibuat dan tindakan telah diambil oleh suatu sistem, tindakan itu –yaitu output- menjadi bagian dari lingkungan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa lingkungan itu telah dirubah oleh output sistem. Namun, cara paling tepat menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya itu adalah sebagai hubungan timbal-balik yang dinamik. Yaitu lingkungan mempengaruhi sistem; sistem mempengaruhi lingkungan; dan lingkungan yang terpengaruh ini mempengaruhi sistem itu lagi. 15

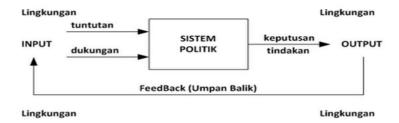
Walaupun proses pembuatan keputusan dalam sistem politik jelas jauh lebih kompleks, unsur-unsurnya yaitu meliputi kegiatan: penerimaan input, interpretasi input, dan penterjemahan ke dalam output. Output itu menjadi bagian dari lingkungan, yang pada gilirannya menghasilkan input baru. <sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mohtar Mas'oed, 1989, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Reorisasi*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, hlm. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.



### (Skema Sistem Politik David Easton)

Relevansi dari teori pembuatan keputusan adalah bahwa pengaruh atau tuntutan kepada pemerintah diikuti dengan terjadinya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok faksi di angkatan tubuh militer Turki dan struktur paralelnya yang berafiliasi dengan gerakan Gülen, sehingga Presiden Erdogan mengecam dan membuat keputusan dengan melarang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan Gülenisme, namun keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Erdogan terhadap sekelompok yang pro dengan Gülen berdampak pada politik dan Hubungan Internasionalnya, sehingga melahirkan output-output baru.

Dan melihat dari kejadian kudeta yang gagal pada Juli 2016 lalu, dimana Presiden Erdogan membuat kebijakan dengan menetapkan dan memutuskan kepada kelompok Gülenisme sebagai gerakan terlarang dan harus dihapuskan, karena kelompok Gülenisme sebagai dalang dari terjadinya kudeta militer di Turki. Sehingga Erdogan melakukan penjagaan yang sangat ketat terkait dengan kelompok Gülenisme, terkhusus kepada para pejabat pemerintah. Dan implikasi logis dari penerapan teori pengambilan putusan berdampak juga bagi lembagalembaga yang berada di negara lain yang terjaring dengan kelompok Gülenisme. Dan tentu ini dapat berakibat terhadap hubungan bilateral negara.

Teori selanjutnya yang penulis gunakan adalah **Teori Kudeta**, yaitu merujuk pada suatu sikap dari tuntutan terhadap pemerintah. Kudeta adalah peristiwa yang jauh lebih demokratik. Bisa dilaksanakan dari "luar" dan bergerak dalam wilayah di luar pemerintah tetapi di dalam negara yang dibentuk oleh jajaran pegawai negeri yang permanen dan professional, angkatan bersenjata dan polisi. Tujuannya adalah untuk melepaskan pegawai-pegawai tetap negara dari kepemimpinan politik, dan ini biasanya tidak bisa terjadi jika keduanya diikat oleh kesetiaan-kesetiaan politis, etis atau tradisioanl.<sup>17</sup>

Dalam bagian-bagian aparatus negara yang lebih penting, angkatan bersenjata, polisi, dan dinas keamanan, semua karakteristik-karakteristik di atas diintensifkan, dengan tingkat disiplin dan kekakuan yang lebih besar. Karena itu aparatus negara sampai sejauh tertentu merupakan "mesin" yang biasanya akan bertindak dalam cara yang sudah bisa diduga dan otomatis.<sup>18</sup>

Kudeta beroperasi dengan memanfaatkan perilaku yang bagai mesin ini: selama kudeta, karena ia memakai bagian-bagian dari aparatus negara untuk merebut kekuasaan; setelah kudeta, karena nilai "tuas-tuas" tergantung pada kenyataan bahwa negara adalah sebuah mesin. <sup>19</sup> Gejolak politik di level pusat, salah satu contohnya adalah kudeta, dan selalu memberikan implikasi terhadap kondisi masyarakat sipil. Kudeta yang dapat diartikan sebagai upaya pergantian kekuasaan terhadap seorang aktor yang memiliki legitimasi untuk memerintah, dengan cara yang illegal dan sering kali erat dengan prinsip-prinsip vandalisme ini

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Edward Luttwak, 1979, *Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, hlm. 12-13.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, hlm, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat di suatu negara. Gejolak ini menyebabkan terbukanya struktur kesempatan politik yang dapat dimaksimalkan oleh kelompok-kelompok di level masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Lebih jauh lagi, proses artikulasi dari kepentingan ini dapat bertransformasi dan terinstitusionalisasi menjadi suatu partai politik.<sup>20</sup>

Dan kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016 merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Erdogan. Kemudian, mereka melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisonal, lalu menciptakan elit birokrasi baru. Namun upaya kudeta tersebut gagal, dimana kudeta tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Turki.

### D. Hipotesis

Dampak politik dan hubungan internasional dari kebijakan Presiden Erdogan terhadap kelompok Gülenisme pasca kudeta militer tahun 2016 adalah:

- Melemahnya peran militer dan berkurangnya kekuasaan kehakiman yang selama ini dikuasai oleh kelompok Gülenisme.
- 2. Terganggunya hubungan bilateral Turki dengan beberapa negara di dunia yang memiliki keterkaitan dengan kelompok Gülenisme atau Hizmet.

<sup>20</sup> Aldo Marchiano Kaligis, 2014, *Implikasi Kudeta terhadap Institusionalisasi Gerakan Sosial: Transformasi FNRP Menjadi Partai Libre di Honduras*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hlm. 44.

#### E. Batasan Penelitian

Penelitian ini dimulai dan difokuskan yaitu pada saat Erdogan memimpin Turki pada tahun 2003 yaitu pada saat Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri Turki dan batasan penelitian ini sampai pada tahun 2016 yaitu saat terjadinya kudeta militer Turki yang gagal sehingga memberikan dampak terhadap keberlangsungan internal Turki dan beberapa negara.

#### F. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan, dan lain-lain. Disini penulis menggambarkan bagaimana Erdogan mampu memperbaiki dan mengembalikan keadaan pemerintahan di Turki pasca Kudeta Militer tahun 2016, dan bagaimana pemerintah Turki dalam membentuk kebijakan terhadap kelompok Gülenisme atau organisasi-organisasi terlarang yang masuk di Turki.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi literatur. Penulis mengambil data dari buku, media-media

elektronik dan artikel-artikel baik dari jurnal maupun berita-berita yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.

# G. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "IMPLIKASI KEBIJAKAN PRESIDEN ERDOGAN TERHADAP KELOMPOK GÜLENISME PASCA KUDETA MILITER TURKI TAHUN 2016". Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami apa yang dibahas dalam skripsi ini serta untuk memberikan pengertian yang jelas maka perlu dijelaskan judul skripsi ini sebagai berikut:

- Implikasi: Berarti suatu dampak atau akibat langsung dari kesimpulan suatu penelitian.
- Kebijakan: Suatu proses dalam pembuatan keputusan suatu mekanisme politis.
- 3. Presiden Erdogan: Presiden Turki
- 4. Gülenisme: Gerakan yang dipimpin oleh Fethullah Gülen yang diibaratkan seperti Ormas Islam dan sekarang popular dengan sebutan Himet.
- 5. Kudeta Militer Turki Tahun 2016: Kudeta yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016, yang dilakukan oleh sekelompok faksi di angkatan bersenjata militer Turki, yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan dan mengambil alih kekuasaan.

Bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah implikasi dari kebijakan Presiden Erdogan terhadap kelompok Gülenisme bukan membahas tentang isi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Erdogan, sehingga karya tulis ini membahas tentang dampak dari kebijakan Presiden Erdogan terhadap kelompok Gülenisme yang berdampak pada politik dan hubungan internasionalnya suatu negara.